

PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA

Sebuah Tinjauan Filosofis

Oleh :

Dwi Siswoyo ¹

Abstrak

Philosophizing is a sustained effort to become aware of life in its wholeness and totality. Speculatively, analytically and prescriptively, philosophical thought moves to more adequate understanding of those ideas and values that guide our lives. Philosophy holds out the promise that we can gain a sense of the meaning of human existence itself. National education as a process leading to the enlightenment of Indonesian Spirit, and the curriculum as the organized experience (in the broadest sense) and as the sequence of course or subjects (in a more precise but restricted sense), must be emptied to human success and happiness.

MAKNA FILOSOFI

Kata filosofi berasal dari perkataan yunani “*philos*” (cinta) dan “*sophia*” (kebijaksanaan) dan berarti cinta kebijaksanaan. Filosofi adalah tidak sama artinya dengan kebijaksanaan, atau hanya studi tentang kebijaksanaan; lebih dari pada itu, ia adalah mencintainya. Implisit dalam suatu cinta ada pengeajaran, dan karena alasan ini para filsuf biasanya mengatakan karya mereka sebagai “pengeajaran kebijaksanaan”, atau lebih sering dikatakan sebagai “pengeajaran kebenaran” (Van Cleve Morris, 1963).

Filosofi dapat didekati atau didefinisikan, sekurang-kurangnya dari empat sudut pandang yang berbeda, yang lebih bersifat suplementari dari pada kontradiktori. Masing-masing sudut pandang perlu diingat sebagai suatu pemahaman yang jernih mengenai makna filosofi (Harold H. Titus, 1970) : (1). Filosofi adalah suatu sikap pribadi terhadap hidup dan alam semesta, (2) Filosofi adalah suatu metode pemikiran reflektif dan pengkajian yang berdasarkan pertimbangan yang sehat, (3) Filosofi adalah suatu usaha untuk memperoleh suatu pandangan yang menyeluruh, (4) Filosofi adalah analisis logis mengenai bahasa dan penjernihan arti dari kata-kata dan konsep-konsep, (5) Filosofi adalah sekelompok masalah dan juga teori-teori tentang pemecahan masalah-masalah ini.

¹ Drs. Dwi Siswoyo, M. Hum. adalah Dosen Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan FIP UNY

MODUS-MODUS FILOSOFI

GEORGE F. KNELLER (1971) menyatakan bahwa ada tiga corak (“*modes or styles*”) filosofi sebagai suatu aktivitas: (1) **Filosofi Spekulatif**, yang berarti suatu cara berpikir secara sistematis tentang segala sesuatu yang ada (‘*whole of reality*’). Ini berarti bahwa berspekulasi adalah suatu tingkatan berpikir filosofis yang lebih mendalam (Imam Barnadib, 1994). Filosofi spekulatif, “*is the attempt to find a coherence in the whole realm of thought and experience*”, (2). **Filosofi Preskriptif**, berusaha untuk menetapkan standar-standar untuk menilai nilai-nilai, memutuskan tindakan, dan menghargai seni. Sesungguhnya, filosofi akan gagal melakukan tuntutannya yang baik untuk meneliti dan membuat pernyataan-pernyataan tentang keutuhan realita jika ia tidak juga meneliti bidang nilai-nilai, bidang mengenai apa yang seharusnya atau sebaiknya dan juga yang mana. Karena realita dimana kita hidup adalah tidak hanya fisik tetapi juga cultural, tidak hanya suatu keseluruhan bidang material, tetapi juga suatu dunia mengenai pemerintah, hubungan-hubungan sosial, moralitas, seni, drama, dan sekumpulan proses lain yang berasal dari hakikat manusia secara totalitas, (3). **Filosofi Analitik**, memfokuskan pada kata-kata dan makna. Filsuf analitik meneliti konsep-konsep seperti jiwa, kebenaran, dan alasan atau sebab, kebebasan akademik, persamaan kesempatan untuk menilai perbedaan makna yang mereka bawa dalam konteks-konteks yang berbeda. Ia menjelaskan apa yang telah kita ketahui dan menunjuk pada ketidak konsistenan dalam pemikiran kita. Ia cenderung bersifat skeptis, berhati-hati dan tidak membuat sistem pemikiran yang baru. Pendekatan analitik ini sampai saat ini mendominasi filosofi Amerika dan Inggris. Sedangkan di Eropa, tradisi spekulatif mempunyai akar yang lebih dalam, yang tegas dan metafisik, masih tumbuh dengan subur. Tetapi jenis filsafat yang mana saja, rupanya menjadi paling penting pada suatu waktu, kebanyakan filsuf setuju bahwa semua jenis perlu. Spekulatif tanpa diikuti juga dengan analisis dengan mudah membubung tinggi ke suatu langit spekulasi itu sendiri, tidak relevan dengan dunia sebagaimana kita mengetahui, dan analisis tanpa spekulasi turun kepada hal-hal yang tidak berarti dan menjadi tak berguna dan hampa.

MENGAPA ORANG (PENDIDIK) MEMBUTUHKAN FILOSOFI

Adalah sering dikatakan bahwa yang mendorong suatu kebutuhan di zaman modern adalah suatu pendirian mengenai arah dan tujuan. Ditengah-tengah kebingungan itu menyebabkan hilangnya jati diri manusia, alienasinya dari dirinya sendiri dan dari bangunan besar teknologis yang telah bangun disekelilingnya, pertumbuhan pengetahuan ilmiah yang dilepaskan dari kebijaksanaan moral (“*moral wisdom*”), dan sebagai akibatnya suatu perasaan sia-sia dan tanpa makna, manusia mendapati dirinya dalam kebingungan dan keputusasaan. Kita membutuhkan visi baru dan nilai-nilai yang direkonstruksi. Kita memerlukan minyak (*balsam*) penyembuh dari suatu kebijaksanaan yang lebih dalam yang akan menuntun kita dari keadaan yang berbahaya zaman sekarang (Chritopher J. Lucas, 1970).

Manusia banyak yang asyik dengan nafsu menuruti kata hatinya pada sat ini dari pada suatu pandangan yang sehat tentang kemungkinan-kemungkinan jangka panjang. Pada hal keuntungan semu jangka pendek tidak mustahil dapat membumerang menjadi kerugian jangka panjang. Untuk ini selain agama, pemikiran-pemikiran filosofis dapat membantu memberi pendirian mengenai arah dan tujuan hidup dan kehidupan.

Dengan peningkatan yang cepat pengetahuan dan kemampuan manusia mengenai dunia fisik dan intelektual, lebih besar pula potensi-potensinya untuk kebaikan dan juga kejahanan. Ini berarti semakin besar pula kemungkinan-kemungkinan yang dapat ditempuh manusia untuk menjalani eksistensinya, untuk membangun adanya, untuk tumbuh dan berubah. Namun yang harus diingat adalah bahwa kita memang gandrung untuk membangun, tumbuh, dan berubah, tetapi tidak dengan harga penghancuran eksistensi dan jati diri kita sendiri. Kita juga ingin turut mengenyam, dan bila mungkin juga menyumbang kemenangan ilmu dan teknologi, tetapi bukan kemenangan semu yang secara “built-in” mengandung kekalahan total, dilihat dari nilai-nilai insani.

Harold H. Titus, menyatakan bahwa menjadi apa dunia kita, sebagian besar tergantung pada apakah kita mempunyai kecerdasan, rasa tanggung jawab, keberanian, dan ketetapan hati untuk merekonstruksi seperangkat nilai di mana kita dapat meyakininya. Filosofi, bersama dengan disiplin-disiplin lain, memainkan peranan sentral dalam integrasi pribadi, rekonstruksi dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, mengapa orang membutuhkan filosofi, dapat dikemukakan sebagai berikut (Harold H. Titus ,1970) :

- a. *Setiap orang, pendidik (guru) harus membuat keputusan dan bertindak.***

Jika kita memutuskan dengan kebijaksanaan dan bertindak secara konsisten, kita perlu menemukan nilai-nilai dan makna dari hal-hal yang akan kita melakukan pilihan dan bertindak atas dasar beberapa skala nilai. Kita harus memutuskan soal-soal mengenai kebenaran kebenaran dan kesalahan, keindahan dan kejelekkan, dan mengenai baik dan buruk.

Mencari norma-norma, dan tujuan-tujuan adalah suatu bagian penting dari tugas filosofi. Filosofi menaruh perhatian pada aspek kualitatif dari segala sesuatu. Ia menolak untuk tidak menghiraukan suatu aspek dari pengalaman manusia yang autentik dan berusaha untuk norma-norma (“*standards*”) dan tujuan-tujuan dalam cara yang paling masuk akal.

Setelah mengajukan pertanyaan “Apakah kegunaan filosofi?”, JAQUES MARITAIN menyatakan bahwa filosofi mengingatkan manusia “mengenai kegunaan tertinggi hal-hal yang tidak berhubungan dengan alat-alat, tetapi dengan tujuan. Bagi manusia tidak hidup hanya dengan roti, vitamin, dan penemuan-penemuan teknologi. Mereka hidup dengan nilai-nilai dan realitas-realitas yang bebas waktu dan pengetahuan yang berharga untuk kepentingan mereka sendiri”.

- b. *Tingkah laku kita adalah milik kita sendiri, dan kita sungguh-sungguh bebas (merdeka) hanya bilamana kita menyandarkan diri pada kontrol batin atau tujuan-tujuan yang kita pilih sendiri.***

Jika orang bertindak sebagaimana yang ia lakukan hanya karena adat-istiadat atau tradisi atau hukum, ia adalah tidak sungguh-sungguh merdeka. Apabila ditanyakan apakah kebaikan filosofi seseorang terhadap tindakannya, ARISTOTELES menyatakan bahwa filosofi memungkinkan ia berbuat dengan kemauan, yang orang lain hanya takut hukum. Manusia adalah merdeka, menciptakan prinsip-prinsip dan hukum-hukum di mana ia hidup. Dalam sebuah masyarakat yang ideal, setiap orang akan setuju dengan setiap hukum atau, jika ia tidak menyukai hukum itu, ia mengritiknya dan merangsang untuk suatu perubahan. Ia akan melakukan ini atas dasar fakta-fakta dan prinsip-prinsip yang konsisten.

- c. *Filosofi adalah alat yang paling baik untuk membantu pengembangan kebiasaan berpikir atau merefleksi.***

Filosofi dapat membantu kita memperluas bidang kesadaran kita untuk menjadi lebih aktif, lebih tajam, lebih kritis, dan lebih cerdas. Dalam banyak bidang spesialisasi pengetahuan, ada sesosok fakta yang pasti dan spesifik, dan siswa atau mahasiswa diberi

masalah-masalah yang demikian agar supaya mereka dapat memperoleh keuntungan praktis dalam mencapai jawaban-jawaban secara cepat dan mudah. Namun dalam filosofi, ada perbedaan pokok pandangan untuk dipertimbangan, dan ada masalah-masalah yang tak terpecahkan yang penting bagi kehidupan. Maka dari itu, rasa heran atau kagum siswa atau mahasiswa, dorongan ingin tahu, dan minat spekulatifnya terpelihara hidup.

- d. Kita hidup dalam suatu masa perubahan dan ketidak pastian, di mana banyak keyakinan dan cara-cara lama melakukan sesuatu, tidak memadai lagi.*

Dalam kondisi-kondisi demikian, kita membutuhkan skala nilai-nilai dan suatu pendirian mengenai arah. Keadaan sekarang, sebagaimana kita merasakan kegelisahan fisik ketika berada di tengah-tengah kekacauan material dan merasakan kegelisahan moral bilamana kita dikonfrontasikan dengan kekejaman dan ketidak adilan, juga merasakan kegelisahan intelektual menghadapi kehadiran pandangan-pandangan dunia yang fragmentaris dan membingungkan. Tanpa suatu pandangan dan jawaban, sebagaimana IRWIN EDMAN tegaskan, dapat mengakibatkan suatu diri yang terbagi (“*a divided self*”), yang mengarah pada ketegangan-ketegangan jiwa atau runtuhnya urat syaraf. Suatu cara yang untuk memperoleh suatu kesatuan pandangan dan jawaban dalam sebuah dunia yang kacau, adalah mencapai suatu integrasi batin, mengetahui mengapa kita setuju dan mengapa kita tidak setuju, dan memperoleh suatu pendirian mengenai makna eksistensi manusia dalam pertemuan dan pergaulannya dengan sesama dan dunia serta dalam hubungannya dengan Tuhan.

- e. Orang ingin untuk mendapatkan keselarasan atau mengadakan penyesuaian antara dirinya dan dunianya.*

Suatu studi filosofi akan membantu orang untuk membangun keyakinan keagamaannya diatas fondasi-fondasi yang matang secara intelektual. Filosofi dapat mendukung kepercayaan keagamaan seseorang, asal saja kepercayaan tersebut tidak tergantung pada konsep-konsep yang pra-ilmiah, usang, sempit, dan dogmatik. Urusan utama agama adalah harmoni, penyesuaian, tanggung jawab, komitmen, pengabdian, perdamaian, kebijakan, keselamatan dan Tuhan.

1. Makna Filosofi Pendidikan

Hubungan antara filosofi dan studi pendidikan di amerika telah mencapai perkembangan signifikansi yang sangat jauh dalam organisasi program-program pendidikan guru (Alfred L. Hall-Quest,1970). Suatu perhatian yang sungguh-sungguh yang telah diberikan oleh para edukator (guru atau dosen), para filsuf dan filsuf pendidikan adalah perhatian terhadap suatu definisi dari istilah “filosofi pendidikan” (George L. Newsome, Jr, 1970).

Newsome mengemukakan pendekatan-pendekatan umum untuk mendefinisikan filosofi pendidikan. Pendekatan-pendekatan ini diklasifikasikan sebagai berikut : (a). Pendekatan pertama, memandang filosofi pendidikan sebagai suatu segi pandangan terhadap pendidikan, (b). Pendekatan kedua, memandang filosofi pendidikan sebagai penerapan filsafat terhadap pendidikan, (c). Pendekatan ketiga, memandang filosofi sebagai teori umum pendidikan.

Pendekatan yang pertama, cakupannya bergerak dari istilah-istilah “praktis” dari pra praktisi pendidikan hingga filosofi-filosofi sistematik. Terkadang orang mendengar atau membaca pernyataan-pernyataan tentang filosofi pendidikan yang disarankan yang tidak lebih merupakan pandangan dan keyakinan yang tidak kritis dari pribadi seseorang mengenai pendidikan. Orang mungkin mendengar ekspresi seperti “filosofi saya tentang ‘audio-visual aid’ adalah...”, atau “filosofi saya tentang manajemen ruang makan adalah...”, dan sejenisnya.

Dalam hal yang sama orang sering menjumpai idea-idea mengenai filosofi pendidikan yang menyatakan bahwa orang pada dasarnya idealistik, realistik, dan sejenisnya.Tetapi, kecenderungan alamiah, kebutuhan untuk dikembangkannya dengan studi formal mengenai sistem-sistem filosofi “*yang bersaing dan bertentangan*”. Studi formal yang dimaksud akan memungkinkan orang, memperoleh “*philosophical home*”-nya dan memungkinkannya lebih baik merumuskan sebuah “*philosophy of life*”-nya. Maka, filosofi pendidikan menjadi suatu studi sistem-sistem filosofis dalam hubungannya dengan pendidikan, seperti idealisme, realisme, pragmatisme dan lain-lain dalam pandangannya tentang pendidikan.

Pendekatan yang kedua terhadap filosofi pendidikan nampaknya merupakan pendekatan yang paling umum dari semua pendekatan yang ada. Imam Barnadib (1994) mengartikan filosofi pendidikan sebagai penerapan suatu analisis filosofis terhadap lapangan pendidikan. Ide penerapan filosofi terhadap pendidikan terhadap pendidikan tidak berarti bahwa ada kesepakatan mengenai bagaimana filosofi diterapkan, dan juga apa yang diterapkan. Filsafat dapat diterapkan

dengan menerapkan jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh para filsuf terhadap berbagai persoalan pendidikan atau yang ada hubungannya dengan pendidikan.

Filosofi dapat juga diterapkan dalam pendidikan karena perumusan-perumusan tujuan-tujuan pendidikan, penggunaan metode-metode, alat-alat dan teknik-teknik, dan dengan demikian filosofi mengkaji persoalan-persoalan pendidikan. Filosofi dapat juga diterapkan dalam cara yang lain, yaitu orang dapat menggunakan “*world frames*”, sistem-sistem filosofi, dan sejenisnya untuk menerangkan atau menginterpretasi pendidikan. Alhirnya orang dapat menerapkan filosofi terhadap pendidikan dengan menarik kesimpulan implikasi-implikasi pendidikan dari filosofi-filosofi sistematis

Pendekatan ketiga terhadap filosofi pendidikan mungkin adalah suatu pendekatan yang tidak banyak mendapat perhatian. Sebagaimana GEORGE E. AXTELLE katakan “...konsepsi filosofi JOHN DEWEY sebagai “*the general theory of education*” adalah bukan hanya satu-satunya wawasan yang paling (“*most profound insights*”) dalam , tetapi satu-satunya “*most profound insights* ” dalam sejarah pemikiran. Tetapi, wawasan itu rasanya tidak terdapat pada banyak edukator (guru, dosen) dan filsuf pendidikan. Apakah implikasi idea bahwa filosofi adalah teori umum pendidikan?

RUANG LINGKUP FILOSOFI PENDIDIKAN

Sebagaimana filosofi formal berusaha untuk memahami realita sebagai suatu keseluruhan dengan menerangkan dalam cara yang paling umum dan sistematis, begitu juga filosofi pendidikan berusaha untuk memahami pendidikan dalam keseluruhannya, mengartikannya dengan mamakai konsep-konsep umum yang akan membimbing pemilihan tujuan-tujuan dan kebijakan-kebijakan pendidikan. Dalam cara yang sama bahwa filosofi umum mengkoordinasikan penemuan-penemuan berbagai ilmu, demikian juga filosofi pendidikan menginterpretasikan atau mengartikannya karena keduanya berhubungan dengan pendidikan.

Teori-teori ilmiah tidak dengan sendirinya membawa implikasi-implikasi pendidikan yang tegas, mereka tidak dapat diterapkan secara langsung. Suatu alasan adalah bahwa para ilmuwan tidak selalu sependapat di antara mereka tentang mana yang merupakan pengetahuan yang pasti. Sebagai contoh adalah bahwa tidak ada suatu teori belajar yang diterima secara umum. Alasan yang lain adalah bahwa dalam memilih tujuan-tujuan dan kebijakan-kebijakan pendidikan, kita harus membuat keputusan-keputusan nilai, kita harus memutuskan yang mana

dari sejumlah tujuan dan alat yang mungkin harus kita ambil. Sebagaimana telah kita ketahui, ilmu tidak dapat membuat keputusan-keputusan yang demikian bagi kita, meskipun ia mungkin banyak memberikan fakta di mana keputusan-keputusan kita didasarkan. Keputusan-keputusan ini harus dibuat dalam kerangka suatu filsafat yang kita sendiri menerimanya.

Filosofi pendidikan berdasar pada filosofi formal karena kebanyakan dari masalah-masalah pokok pendidikan pada hakikatnya, persoalan-persoalan filosofis. Kita tidak dapat mengkritik cita-cita dan kebijakan-kebijakan pendidikan atau mengusulkan cita-cita dan kebijakan-kebijakan pendidikan yang baru tanpa mempertimbangkan persoalan-persoalan filosofis secara umum seperti hakikat kehidupan yang baik, kemana pendidikan harus diarahkan, hakikat masyarakat, karena pendidikan adalah suatu proses sosial, dan hakikat realita yang ultim (terakhir), yang semua pengetahuan berusaha untuk menembusnya. Maka filosofi pendidikan, memerlukan penerapan filosofi terhadap bidang pendidikan. Seperti halnya filosofi umum, filosofi pendidikan adalah spekulatif, preskriptif, dan kritis atau analitik.

Filosofi pendidikan adalah spekulatif, apabila ia berusaha untuk menetapkan teori-teori tentang hakikat manusia, masyarakat, dan dunia, dengan menyusun dan menginterpretasikan data yang terkumpul dari penelitian pendidikan dan ilmu-ilmu mengenai manusia (“*human sciences*”). Filsuf pendidikan mungkin menetapkan teori-teori tersebut dengan mengambil dari satu atau lebih filosofi-filosofi formal dan kemudian menerapkannya terhadap pendidikan atau kalau tidak dengan bergerak dari persoalan-persoalan pendidikan yang khusus kepada suatu kerangka filosofis yang mampu memecahkan mereka.

Filosofi pendidikan adalah juga preskriptif. Ia menetapkan tujuan-tujuan yang pendidikan harus mengikuti dan cara umum yang harus digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Ia menetapkan dan menerangkan tujuan-tujuan dan cara-cara sistem pendidikan kita yang ada dan mengusulkan tujuan-tujuan dan cara-cara yang lebih lanjut untuk pertimbangan. Untuk maksud ini, “*fakta-fakta*”, sungguhpun definitif, tidak dapat mencukupi. Mereka hanya menunjukkan kurang lebih secara seksama konsekuensi-konsekuensi dari pengambilan kebijakan-kebijakan tertentu. Mereka tidak mengatakan apakah kebijakan-kebijakan itu diperlukan sekali atau, jika diperlukan sekali apakah mereka membenarkan dengan terbuka atau tiruan dari kebijakan-kebijakan lain.

Filosofi pendidikan adalah juga analitik dan kritis. Dalam artian ini, peranan filosofi pendidikan adalah untuk menganalisis teori-teori spekulatif dan preskriptifnya sendiri dan juga

teori-teori yang ia dapatkan dalam disiplin-disiplin lain. Ia menguji rasionalitas dari cita-cita pendidikan kita, konsistensi mereka dengan cita-cita yang lain. Ia menguji secara logik dari konsep-konsep kita dan kecukupannya terhadap fakta-fakta yang mereka berusaha untuk menerangkannya. Ia berusaha menunjukkan ketidak konsistenan di antara teori-teori kita dan menunjukkan teori-teori yang ditinggalkan bilamana ketidak konsistenan diambil. Ia juga meneliti proliferasi yang besar sekali dari konsep-konsep pendidikan.

FILOSOFI KURIKULUM

Filosofi membekali edukator (pendidik) dan atau ahli pendidikan (khususnya ahli kurikulum), dengan sebuah kerangka untuk mengorganisasikan sekolah dan kelas. Ia membantu mereka menjawab apa tujuan sekolah, apa mata pelajaran yang bernilai, bagaimana siswa belajar, dan apa metode serta materi-materi yang tepat digunakan. Filosofi membekali mereka dengan sebuah kerangka untuk isu-isu dan tugas-tugas yang luas, seperti menentukan tujuan-tujuan pendidikan, isi mata pelajaran dan pengorganisasianya, proses belajar dan mengajar, dan aktivitas-aktivitas dan pengalaman apa yang ditekankan di sekolah dan kelas. Ia juga membekali edukator dengan suatu dasar untuk membuat keputusan-keputusan seperti buku kerja, buku teks apa, atau aktivitas-aktivitas kognitif dan non-kognitif lain apa dan bagaimana menggunakannya, pekerjaan rumah apa yang ditugaskan dan seberapa banyak, bagaimana menguji siswa dan bagaimana menggunakan hasil-hasil ujian, dan mata pelajaran apa yang ditekankan. Sesungguhnya, menurut Allan C. Ornstein (1995) hampir semua unsur kurikulum didasarkan pada filsafat.

Sebagai fokus dan pusat vital dari usaha-usaha pendidikan (sekolah), kurikulum adalah lokus kontroversi-kontroversi yang paling tajam. Pembuatan keputusan masalah-masalah kurikuler melibatkan pertimbangan, pengkajian, dan formulasi tujuan-tujuan pendidikan. Hal ini menyangkut persoalan perencanaan dan organisasi kurikulum : Pengetahuan apakah yang paling berharga? Pengetahuan apakah yang harus diintroduksikan kepada "*the learner*"? Apakah kriteria untuk menseleksi pengetahuan? Apakah pengetahuan yang dimaksud bernilai bagi "*the learner*" sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat? Jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya menentukan apa yang masuk dan apa yang dilarang masuk dari program-program pembelajaran sekolah, tetapi juga pada akhirnya didasarkan pada asumsi-

asumsi tentang hakikat alam semesta, hakikat manusia, hakikat masyarakat dan hakikat kehidupan yang baik (*the good life*) (Gerald L. Gutek, 1988).

Kurikulum telah didefinisikan dalam berbagai cara. Sebagian terbesar sepanjang sejarah pendidikan, kurikulum terdiri dari ketrampilan-ketrampilan dasar membaca menulis, dan berhitung matematis pada sekolah dasar, dan seni dan ilmu-ilmu pada level menengah dan tinggi. Dalam arti yang paling luas, kurikulum dapat didefinisikan sebagai pengalaman yang terorganisasi yang peserta didik miliki di bawah bimbingan dan kontrol sekolah. Dalam arti terbatas, kurikulum adalah “*the systematic sequence*” dari mata pelajaran yang merupakan program-program pembelajaran formal sekolah (Gerald L. Gutek, 1988).

Bagaimana asumsi-asumsi dasar filosofis dalam menyusun kurikulum di negara kita? Kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia dulu mestinya bukan KBK yang lahir dari aliran **behaviorisme**. Kalau yang kita terapkan bukan KBK yang **behavioristis** itu, pengembangan kurikulum perlu didasarkan pada pendekatan yang oleh **Notonagoro** (1974) disebut “*eklektik-inkorporatif*”, yaitu dapat mengambil unsur-unsur yang baik dari aliran-aliran filsafat asing untuk diintegrasikan dengan sistem pendidikan nasional kita. *Pendidikan nasional*, menurut **Ki Hadjar Dewantara** (1956), “ialah pendidikan yang berdasarkan garis hidup bangsanya (*kultural-nasional*) dan ditujukan untuk keperluan perikehidupan (‘maatschappelijk’), yang dapat mengangkat derajat negeri dan rakyatnya, sehingga bersamaan kedudukan dan pantas bekerja sama dengan lain-lain bangsa untuk kemuliaan segenap manusia seluruh dunia”.

Kurikulum sebagai alat pendidikan, tidak dapat dilepaskan dari hakikat pendidikan itu sendiri. Pendidikan adalah dialog bukan monolog. Pendidikan atau edukasi adalah dialog antar subjek pendidikan dalam menghadapi realitas. Sehubungan dengan itu, guru atau dosen sebagai faktor kunci dalam pembaharuan pendidikan, dalam kebijakan dan penerapan kurikulum, perlu senantiasa diajak dialog untuk mencapai “*fusi horizon makna*”, agar pengalaman guru atau dosen yang berharga dapat direkonstruksi atau didekonstruksinya menjadi lebih bermakna, sehingga hasil dialog itu akan menjadi miliknya, yang pada waktu lain akan didialog lagi. Kurikulum hasil dialog tentu saja bukan “*format-oriented*”, tetapi lebih “*goal-oriented*”. Selama penerapan kurikulum “*format-oriented*” yang memandang guru atau dosen sebagai objek, selama itu pula berlangsung indoktrinasi (monolog) yang beku tidak menggairahkan, bukan edukasi yang memberikan pencerahan dalam mewujudkan cita-cita pendidikan. Indoktrinasi hanya akan meninggalkan sejarah yang hampa tanpa makna, hanya menghadirkan keuntungan semu jangka

pendek tanpa sustainabilitas, dan tidak mustahil akan menjadi bumerang bagi kerugian jangka panjang, yang pendidikan kita sudah banyak mengalami hal ini.

Muara kurikulum dan pendidikan pada hakikatnya adalah peserta didik yang sukses belajar dalam arti luas, sehingga dapat menjadi manusia yang sukses hidupnya, atau menurut Ki Hadjar Dewantara (1977) “*dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya*”, atau menurut Notonagoro (1973) “*dapat mencapai tujuan hidup kemanusiaan, kebahagiaan sempurna dalam keseimbangan kesatuan organis harmonis dinamis*”.

Dalam proses pendidikan (pembelajaran), pendidik perlu senantiasa memberi dorongan serta memberi kesempatan (*tut wuri handayani*) agar peserta didik dapat mengaktualisasikan dirinya seoptimal mungkin untuk mencapai sukses. Sebagai alat pendidikan, kurikulum perlu diperlakukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan tidak dapat direduksi sebagai kurikulum, begitu pula pendidikan tidak direduksi sebagai pembelajaran. Pembelajaran memang upaya pendidik untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar (Sudjana, 2000). Namun pembelajaran menurut John Dewey (1950) hanya “*as the means of education*”. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang mendidik, dalam arti pendidik secara integratif memberi muatan nilai-nilai, dalam proses transmisi dan transformasi pengetahuan dan ketrampilan-ketrampilan kepada peserta didik. Agar dalam transmisi dan transformasi nilai-nilai itu berhasil dengan baik, pendidik harus menjadi teladan bagi peserta didik. Dalam hal ini peserta didik cenderung lebih mengikuti apa yang dilakukan pendidik dari pada apa yang dikatakan pendidik.

Ada sejumlah hal yang esensial bagi pendidik :

1. Pada dasarnya memang tidak ada pendidik (guru atau dosen) yang sempurna. Tetapi perlu diyakini bahwa ada pendidik (guru atau dosen) yang baik. Pendidik (guru atau dosen) yang baik adalah guru/dosen yang senantiasa berusaha untuk menjadi lebih baik.
2. Mencintai pekerjaan guru atau dosen sebagai sebagai profesi (‘*to serve the common good*’ untuk mewujudkan “*human welfare*”), sebagai panggilan hidup (*a career of life*), menghadirkan pada diri yang bersangkutan memiliki suatu komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugasnya dengan penuh kesungguhan, kerja keras dan tanggung jawab.
3. Pendidikan tinggi hendaknya berperan dalam pengkajian konsep-konsep pembaharuan pendidikan nasional dalam lingkup makro (reformasi pendidikan) dan dalam lingkup mikro (inovasi pendidikan), sehingga upaya-upaya pembaharuan tidak terkesan tambal sulam tanpa

bingkai yang jelas dan bersifat parsial disintergratif, dengan menggunakan “ *borrowing approach*” dari luar seperti dewasa ini. Hal inilah yang sudah jauh-jauh hari pernah disinyalir dan dirisaukan oleh Notonagoro.

4. Pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan tinggi hendaknya senantiasa mengacu sebagaimana dikemukakan oleh Notonagoro (1974), dalam suatu kuliah yang pernah penulis ikuti, yang menyatakan bahwa pendidikan nasional Indonesia *bersifat dwi tunggal, yaitu pengembangan kepribadian dan kemampuan/keahlian dalam kesatuan organis harmonis dinamis*, sehingga mendukung upaya mewujudkan manusia seutuhnya
5. Seorang guru atau dosen yang baik menurut pandangan Buber, seorang tokoh eksistensialisme, “*not impose his personality or will on student, but rather sets an atmosphere of communication and communion with him*” (Frederick C. Gruber, 1973). Dosen perlu senantiasa menyadari bahwa pendidikan atau udukasi (education) adalah dialog, bukan monolog, sebab kalau monolog adalah indoktrinasi. Dialog, seperti dimaksud oleh Hans-Georg Gadamer (1975), seorang tokoh hermeneutika dialektis, untuk mencapai fusi horizon makna yang dapat lebih mendekati kebenaran. Hasil dialog dapat senantiasa didialog lagi, dan begitu seterusnya.
6. Tugas-tugas yang diberikan kepada siswa/mahasiswa sebaiknya, ada pilihan-pilihan (beberapa alternatif) agar lebih menanamkan nilai tanggung jawab. Karena manusia senantiasa dihadapkan pada pilihan-pilihan yang harus dipilihnya (yang ini atau yang itu, yang benar atau yang salah, yang baik atau yang buruk dst., *Either Or* menurut Kierkegaard, bapak aliran eksistensialisme). Kalau manusia belum memilih berarti belum menjalani eksistensinya sebagai manusia, dan kalau manusia sudah memilih, ia harus mempertanggung jawabkan atas pilihannya itu.
7. Ada empat aktivitas inti (*core activities*) yang mencirikan suatu institusi pendidikan tinggi yang berupaya secara serius dalam mewujudkan kualitas, yaitu : (a) *teaching and learning*, (b) *student assessment* (c) *staff development*, dan (d) *quality assurance processes* (Ronald Barnett, 1992). Melalui domain-domain aktivitas ini pula pendidikan tinggi melakukan asesmen kuantitatif dan kualitatif : seberapa baik kinerja insitusi dalam masing-masing domain.
8. Sebuah lembaga pendidikan tinggi layak disebut perguruan tinggi (PT) karena “*mendewasakan pribadi*” mahasiswanya sebagai manusia dan warga negara. Pendidikan

tinggi yang hanya mempersiapkan mahasiswanya mencari pekerjaan, tidak layak disebut PT karena tidak pernah sempat memperhatikan nilai-nilai yang menentukan bobot seorang manusia dan seorang warga negara (J. Drost SJ, 1999). Perguruan tinggi sedikitnya memiliki tiga misi : (a) menjalankan tugas humanistik, yaitu membantu peserta didik untuk memasuki kebudayaan dan berperan aktif di dalamnya, (b) mempelajari kebudayaan masyarakat serta menafsirkannya secara kritis, dan (c) membantu peserta didik agar dapat memasuki dunia kerja, karena bagaimanapun juga pekerjaan merupakan hal yang esensial bagi kehidupan manusia (M. Sastrapragedja SJ, 1996).

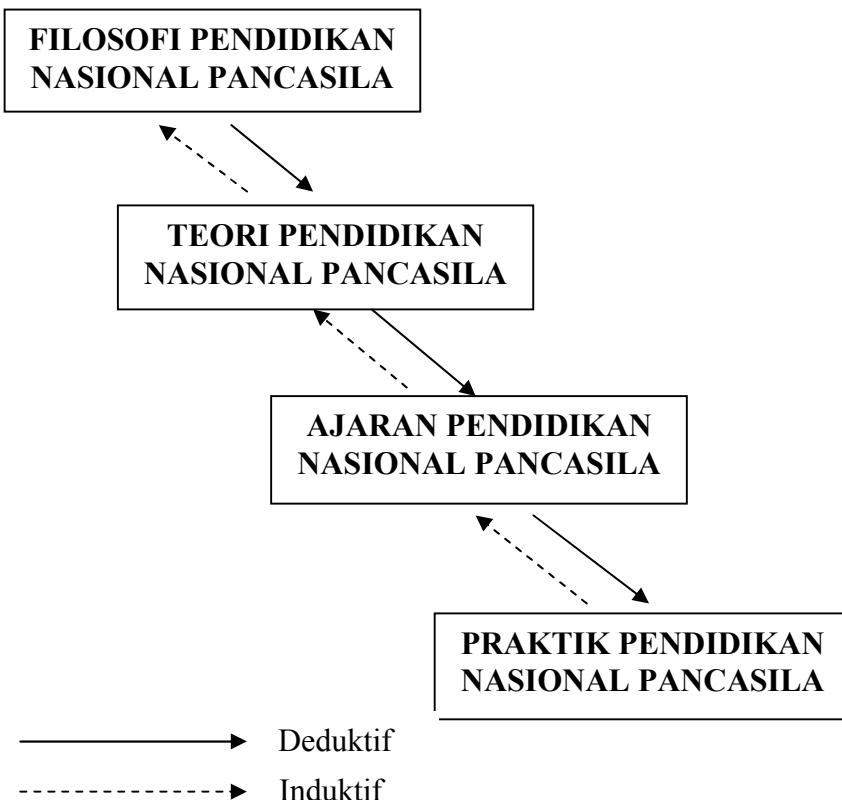
Soedjatmoko (1991) mengemukakan tanggung jawab utama universitas, yaitu kemampuan menelurkan gagasan-gagasan baru, mengadakan inovasi, menangani teknologi canggih, menciptakan barang-barang baru, serta kemampuan mengintergrasikan ini semuanya di dalam kerangka sosial budaya dan nilai kita sendiri. Universitas menurutnya juga mempunyai tanggung jawab membina mahasiswa supaya berani berdiri sendiri dan berusaha sendiri (memupuk sikap wiraswasta, yang berani ambil resiko, dan tidak hanya ingin menjadi pegawai negeri. Kemampuan *“independent critical thinking”* yang menjadi landasan mutlak untuk semua ini tidak hanya memerlukan kebebasan akademis tetapi juga suatu kebudayaan akademis yang merangsang berpikir mandiri dan kritis. Hal ini berarti bahwa pola menghafal di luar kepala merupakan pola yang kontra-produktif, dan yang akan menghalangi pengembangan kreativitas dan pembaharuan. Pada hal kemampuan-kemampuan semacam itulah yang akan menentukan berhasil tidaknya bangsa kita menghadapi masa depan.

Oleh karena itu, ***bukanlah kuliah*** yang menjadi jantung hati universitas, tetapi yang menjadi jantung hati universitas adalah ***perpustakaan, laboratorium, dan hubungan kerja sama yang erat antara dosen dan mahasiswanya***. Kuliah hanya suatu pelengkap studi mahasiswa di dalam perpustakaan, laboratorium, atau di lapangan (Soedjatmoko, 1991). Komitmen yang tinggi bagi mahasiswa untuk *“resources based-learning”* yang multi-dimensional mutlak diperlukan. Soedjatmoko (1985) juga pernah menyatakan bahwa universitas kita haruslah mampu, lebih efektif mengaitkan studi ilmu manusia dan budaya kepada masalah-masalah moral baik yang kecil atau mikro maupun yang besar atyau makro, yaitu perihal tujuan-tujuan sosial dan nasional, termasuk keadilan sosial dalam konteks nasional, regional dan global, juga masalah-masalah pembangunan yang menyangkut usaha mencari bentuk masyarakat yang lebih insani di dalam lingkungan yang juga di Dunia Ketiga semakin dikuasai oleh teknologi. Pendeknya hal ini berarti

perlunya memperkuuh kemampuan bangsa untuk menjalankan “*moral reasoning*” sehubungan dengan usaha-usaha pembangunan.

KEDUDUKAN FILOSOFI PENDIDIKAN NASIONAL PANCASILA

Kedudukan filosofi pendidikan nasional secara hierarkhis oleh Notonagoro (1974) diikhtisarkan (dalam Model 1) sbb. :



Dilihat dari kedalamannya, **Filosofi Pendidikan** merupakan pengetahuan yang paling dalam tentang pendidikan, dan agak kurang dalam lagi adalah **Teori Pendidikan**, dan yang lebih kurang dalam lagi adalah **Ajaran Pendidikan**, dan baru kemudian adanya **Praktik Pendidikan**.

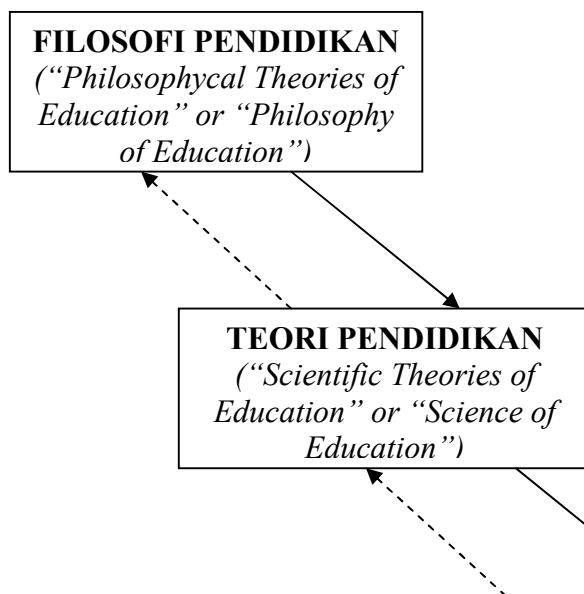
Di antara pengetahuan tentang pendidikan tersebut di atas, Ajaran Pendidikanlah yang bersifat imperatif, artinya harus dilaksanakan. Teori Pendidikan dan filosofi Pendidikan pada hakikatnya tidak harus dilaksanakan, kalau Ajaran Pendidikan sudah mencukupi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam praktik pendidikan. Namun, karena adanya keragaman taraf kedalaman dan kompleksitas permasalahan pendidikan, Ajaran Pendidikan ternyata tidak mencukupi untuk menjawab permasalahan-permasalahan pendidikan,

sehingga harus dicari pemecahannya dalam Teori Pendidikan. Begitu pula, permasalahan yang tidak terjawab dengan Teori Pendidikan, dicari pemecahannya dalam Filosofi Pendidikan.

Filosofi Pendidikan adalah penerapan filosofi terhadap pendidikan (George L. Newsome JR., 1970), atau penerapan suatu analisis filosofis terhadap lapangan pendidikan (Imam Barnadib, 1994) untuk menjawab masalah-masalah pendidikan yang filosofis. Sedangkan kata teori, memiliki status sebutan honorik. Ia merupakan kata yang sering digunakan tetapi jarang didefinisikan dalam literatur pendidikan. Demikian pula dengan kata praktik.

Teori, pada hakikatnya terdiri atas konsep-konsep yang tersusun secara logis (Imam Barnadib & Sutari Imam Barnadib, 1996). Secara etimologis, kata teori berarti sesuatu yang *"dijumpai"* dalam pikiran, rencana, maksud yang baik, usulan atau pandangan yang sistematik tentang suatu bidang studi (kajian). Kata praktik umumnya menunjuk pada kinerja, tindakan atau perbuatan yang didasarkan pada kebiasaan, seni, atau strategi. George F. Kneller (1971) mengemukakan bahwa **Teori Pendidikan**, di satu pihak dapat diartikan sebagai sebuah atau serangkaian hipotesis yang telah diverifikasi dengan observasi atau eksperimen. Di lain pihak, teori dapat diartikan sebagai sebuah atau serangkaian pemikiran yang sistematik atau koheren tentang pendidikan. Teori pendidikan atau pedagogik atau ilmu pendidikan adalah ilmu yang berdiri sendiri atau ilmu yang otonom (Sutedjo Brodjonagoro, 1966; Endang Soekarlan, 2007). **Ajaran Pendidikan** dapat diartikan sebagai ketentuan-ketentuan tentang pendidikan yang dibuat oleh orang atau badan yang berwenang, dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Notonagoro, memberi contoh Ajaran Pendidikan, misalnya dengan perundangan-undangan pendidikan. Perundang-undangan pendidikan bersifat imperatif, artinya harus dilaksanakan.

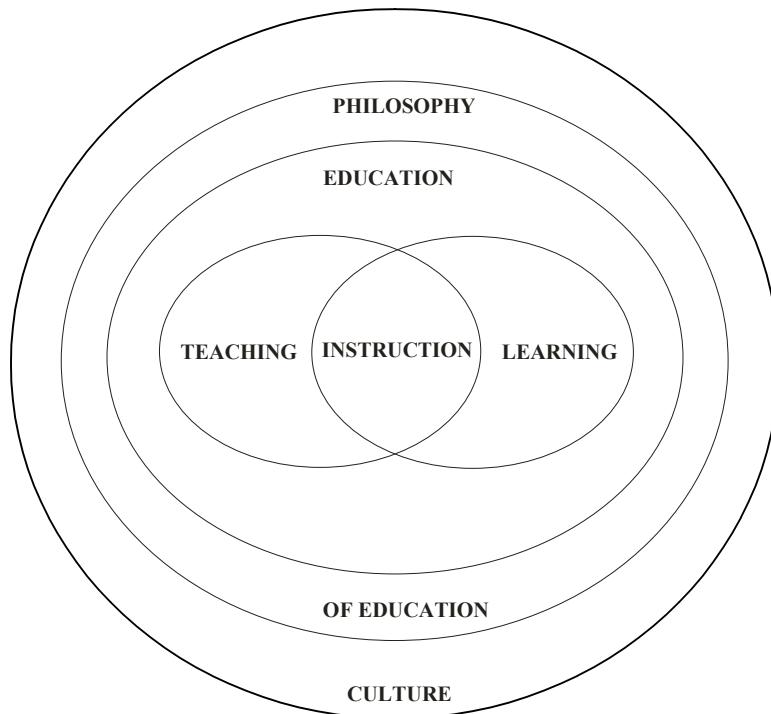
Model 2 hierarki pengetahuan tentang pendidikan yang penulis kemukakan berikut ini, sejalan dengan pandangan Notonagoro di atas. Model yang dimaksud dapat diikhtisarkan sebagai berikut :



PENDIDIKAN JANGAN DIREDUKSI

Pengkajian kehakikat dan tujuan pendidikan sebagian besar telah digantikan dengan sebuah jenis **reduksionisme** : derivasi kecakapan-kecakapan atau kompetensi-kompetensi dari tugas-tugas yang dipikul para guru diterjemahkan dalam "*behavioral objectives or outcomes*". Hanya ada kalanya dijumpai seorang profesor atau seorang guru di kelas pendidikan guru mencelupkn dalam diskursus tentang pendidikan sebagaimana digambarkan oleh Gary Fenstrmacher atau Israel Scheffer, yang berbicara tentang pembentukan kebiasaan-kebiasaan pengambilan keputusan, pembentukan karakter, peningkatan standar, kecakapan pemahaman, pengembangan rasa dan perbedaan, stimulasi kuriositas dan keheranan, pembentukan gaya dan sebuah rasa keindahan, penumbuhan sebuah kehausan terhadap ide-ide dan visi-visi baru yang masih belum dikenal (John I. Goodlad, 1994). **Pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan** harus senantiasa dalam dinamika bingkai moral, karena pendidikan (termasuk pengajaran) adalah "*moral enterprise*". "*Culture is more than ways of doing, it also involves beliefs or*

interpretations... Teachers need time and 'permission' to talk and listen to their students and colleagues and to attend to their needs" (George W. Noblit, Dwight L. Rogers & Brian M. McCadden, 1995)



Gambar di atas penulis adaptasi dari E.S. Maccia (1967) yang dikutip oleh Ronald Hyman (ed, 1971).

“Teaching, characteristically, is moral enterprise. The teacher, whether he admits it or not, is out to make the world a better place” (Philip W. Jackson, 1971). “Instruction is teaching-learning viewed as influence toward rule-governed behavior” (Ronald Hyman, 1971). Sedangkan John Dewey (1950) mengingatkan bahwa “instruction as the means of education”. Dan Frederick Mayer (1963) menegaskan bahwa “Education, I believe, demands a qualitative concept of experience. Thus, we should regard education as a process leading to the enlightenment of mankind”.

Proses pendidikan, menurut John Dewey (1950) adalah sebuah proses reorganisasi, rekonstruksi, transformasi pengalaman yang tiada henti. Dalam hal ini ditekankan kualitas pengalaman yang bermakna bagi kehidupan. John Dewey memandang pendidikan bukan sebuah persiapan untuk hidup, melainkan bagian dari hidup itu sendiri. Ini yang perlu ditekankan dalam dunia pendidikan kita, sehingga ***misi pendidikan*** dimuarakan untuk mencapai kebahagiaan

sempurna dalam kesatuan organis harmonis dinamis (Notonagoro, 1973), atau keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya bagi peserta didik (Ki Hadjar Dewantara, 1977). Manusia sebagai persona tidak sempurna, tetapi *ia dapat dan harus menjadi sempurna* (Driyarkara, 2006).

Misi pendidikan di atas, di dukung oleh fungsi pendidikan, yang menurut Noeng Muadzir (2000) meliputi tiga fungsi, yaitu : (1) Menumbuhkan kreativitas subjek-didik, (2) Memperkaya khasanah budaya manusia, memperkaya nilai-nilai insani, dan nilai-nilai ilahi, dan (3) Menyiapkan tenaga kerja produktif. Dalam konteks pendidikan nasional, fungsi pendidikan adalah “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa(Undang-Undang No. 20 tahun 2003, pasal 3).

Upaya membangun karakter yang baik, diperlukan adanya pendekatan dialogis atau resiprokal secara transformative juga mengembangkan terbangunnya masyarakat belajar (“*learning community*”). “*Only in a learning community can adults and children together explore and practice the mutuality and reciprocity essential to sustaining human life and democratic society*”. ((Joan Lippisitz, 1995)

Regenerasi bangsa tidak cukup hanya lewat beranak cucu, tetapi juga lewat penerusan nilai dan visi. Sebuah bangsa bertahan melebihi satu generasi karena identitas diri yang ditopang kontinuitas nilai dan visinya. Sejauh ini perkembang biakan nilai belum menjadi fokus pendidikan nasional. (Yonky Karman, Kompas 12 Mei 2007). Secara prospektif pengembangan nilai-nilai adalah sangat esensial di masa kini dan masa depan.

Dunia pendidikan perlu dipandang secara prospektif, yaitu sebagai sebuah utilisasi masa lampau sebagai sebuah sumber dalam sebuah pengembangan masa depan (John Dewey, 1950). Masa depan yang dirindukan adalah berhasilnya pengembangan dua sisi mata uang sifat pendidikan nasional kita, yaitu pengembangan kepribadian dan kemampuan/keahlian dalam kesatuan organis, harmonis, dinamis (Notonagoro, 1974).

Soedjatmoko (1985) pernah mengingatkan bahwa universitas, haruslah mampu lebih efektif mengaitkan studi ilmu manusia dan budaya kepada masalah-masalah moral baik yang yang kecil atau mikro maupun yang besar atau makro, yaitu perihal tujuan-tujuan social dan nasional, termasuk keadilan social dalam konteks nasional, regional dan global; juga masalah-masalah pembangunan yang menyangkut usaha mencari bentuk masyarakat yang lebih insani di dalam lingkungan yang juga di dunia Ketiga semakindu kuasai oleh teknologi. Pendeknya hal ini

berarti perlunya memperkuuh kemampuan bangsa untuk menjalankan “*moral reasoning*” sehubungan dengan usaha-usaha pembangunan.

Keahlian, kepandaian, dan ilmu pengetahuan, semua tidak mungkin diabaikan, tetapi yang lebih tidak mungkin diabaikan ialah “*manusia susila dan sempurna*”. Tanpa manusia susila tidak mungkin ada demokrasi, ada Negara teratur, ada ekonomi sehat, tidak mungkin ada teknik tinggi yang digunakan untuk kemakmuran bersama. “*Pintar*” tanpa kesusilaan hanya akan menjadi “*minteri*” (menyalah-gunakan kepandaianya) (Driyarkara, 2006). Banyak orang “*pinter*” yang tidak “*berkarakter*”.

“*Mem manusiakan manusia muda*”, itulah yang merupakan gambaran dasar dari setiap perbuatan mendidik. Arti dan perbuatan mendidik *ialah bahwa dengan tindakannya itu pendidikan* (hendak) *mem manusiakan manusia muda*. *Pengangkatan manusia ke taraf insani*, itulah yang menjelma dalam semua perbuatan mendidik, yang jumlah dan macamnya tak terhitung. Dengan istilah yang sangat singkat, tetapi agak aneh, kita bisa berkata bahwa inti sari atau eidos dari pendidikan ialah *pemanusiaan manusia muda*. Pendek kata, itulah inti sari mendidik. Ilmu pendidikan, tidak hanya dalam arti praktis, tetapi juga *teorisasi* dan *universalisasi* (Driyarkara, 2006)

RM. Hutchins (1953), pernah menyatakan pula bahwa sistem pendidikan bertujuan “*to improve man as a man*”, agar menjadi sebenar-benar manusia. Humanisasi penting karena sebagian kita masih pada tingkat peradaban yang rendah, yang dapat dilihat dalam sikap perikemusiaan. Teknologi, penjelajahan demografis serta perubahan-perubahan alam yang besar dan tiba-tiba dapat menimbulkan dehumanisasi, sehingga usaha rehumanisasi tak dapat diabaikan. Kita harus berusaha pula agar manusia makin sempurna, lebih baik daripada manusia kemarin (T. Jacob, 2007).

Kita memang gandrung untuk membangun, untuk tumbuh dan berubah, tetapi bukan mereduksi pendidikan, atau bahkan dengan harga setinggi penghancuran eksistensi dan nilai-nilai insani. Kita ingin mengenyam dan menyumbang untuk kemajuan ilmu dan teknologi, tetapi bukan kemajuan semu yang secara “*built-in*” mengandung kemuduran total dilihat dari nilai-nilai insani (“*human values*”).

URGENSI PENYUSUNAN FILOSOFI PENDIDIKAN NASIONAL PANCASILA

Pada dekade-dekade akhir-akhir ini nampak ada fenomena dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan, yaitu bahwa pemikiran-pemikiran yang mendasar dan komprehensif terpinggirkan dan direduksi sehingga yang mengemuka cenderung lebih menunjukkan pemikiran-pemikiran yang bersifat ekonomis teknis. Pemikiran-pemikiran yang bersifat ekonomis teknis lebih dipandang dapat untuk menjawab permasalahan-permasalahan kehidupan (pendidikan) padahal akar permasalahannya lebih bersifat mendasar dan komprehensif. Dalam pendidikan nasional kita, berbagai upaya pembaharuan pendidikan nampak lebih cenderung bersifat tambal sulam dan parsial tanpa bingkai yang jelas, padahal tujuan atau muara penyelenggaraan pendidikan nasional tidak boleh menyimpang dari dasar falsafah dan tujuan pendidikan nasional.

Agar penyelenggaraan dan usaha-usaha pembaharuan pendidikan nasional, termasuk usaha-usaha mengatasi permasalahan-permasalahan pendidikan nasional ada dasar acuan tunggal yang jelas, kita perlu memiliki pedoman yang dapat dijadikan rujukan fiosofis, yaitu Filosofi Pendidikan Nasional Pancasila. Sehubungan dengan pentingnya usaha membangun Sosok Filosofi Pendidikan Nasional itu, penulis melakukan pengkajian dengan menggunakan pendekatan hermeneutikan dialektis, khususnys hermeneutika dialektis Hans-Georg Gadamer.

Dalam suatu kuliah, yang penulis ikuti dalam tahun 1973, Notonagoro menegaskan bahwa *sifat dwi tunggal pendidikan nasional ialah pengembangan kepribadian dan kemampuan/keahlian, dalam kesatuan organis harmonis dan dinamis*. Dengan demikian, pendidikan nasional kita perlu senantiasa mengelorakan pengembangan "*Indonesian spirit*" (nasionalisme) dan ilmu dan teknologi yang tidak bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dalam proses pembentukan, sehingga kita menjadi bangsa yang maju, bermartabat, dan memiliki jati diri yang kokoh dan dinamis, dan dapat menjawab tantangan nasional dan global. Keprihatinan dalam pendidikan nasional kita sekarang adalah banyak orang (anak) "*pinter*" tetapi tidak "*berkarakter*".

Memandang kondisi persoalan pendidikan nasional kita, M. Sastraprasedja (2001) memandang pentingnya *pendidikan sebagai humanisasi*, dan Tilaar (2005) memandang perlunya *manifesto pendidikan nasional*, sehingga upaya pendidikan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mencapai cita-cita nasional secara bertahap dapat diwujudkan. Untuk itu, filosofi pendidikan nasional Indonesia, perlu dirumuskan.

Pendidikan merupakan fenomena insani (Driyarkara, 1980), sehingga pendidikan nasional merupakan fenomena insani bangsa Indonesia. Tujuan pendidikan, adalah *"to improve man as a man"* M. Hutchins (1953), sehingga menjadikan manusia yang dapat melaksanakan hidupnya dalam pertemuan dan pergaulannya dengan sesama dan dunia, serta dalam hubungannya dengan Tuhan.

Pada dekade-dekade akhir-akhir ini nampak ada fenomena dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan, yaitu bahwa pemikiran-pemikiran yang mendasar dan komprehensif terpinggirkan dan direduksi sehingga yang mengemuka cenderung lebih menunjukkan pemikiran-pemikiran yang bersifat ekonomis teknis. Pemikiran-pemikiran yang bersifat ekonomis teknis lebih dipandang dapat untuk menjawab permasalahan-permasalahan kehidupan (pendidikan) padahal akar permasalahannya lebih bersifat mendasar dan komprehensif. Dalam pendidikan nasional kita, berbagai upaya pembaharuan pendidikan nampak lebih cenderung bersifat tambal sulam dan parsial tanpa bingkai yang jelas, padahal tujuan atau muara penyelenggaraan pendidikan nasional tidak boleh menyimpang dari dasar falsafah dan tujuan pendidikan nasional.

Agar penyelenggaraan dan usaha-usaha pembaharuan pendidikan nasional, termasuk usaha-usaha mengatasi permasalahan-permasalahan pendidikan nasional ada dasar acuan tunggal yang jelas, kita perlu memiliki pedoman yang dapat dijadikan rujukan fiosofis, yaitu Filosofi Pendidikan Nasional Pancasila. Sehubungan dengan pentingnya usaha membangun Sosok (Konstruk) Filosofi Pendidikan Nasional

Penyusunan Sosok (Konstruk) Filosofi Pendidikan Nasional Indonesia, yaitu Filosofi Pendidikan Nasional Pancasila, diharapkan dapat sebagai sebuah filosofi yang benar-benar dapat berperan sebagai *sebuah sumber pangkal bingkai yang kontekstual dan dinamis terhadap teori dan praksis pendidikan nasional Indonesia*. Filosofi pendidikan nasional yang *objek meterialnya adalah pendidikan nasional*, dan *objek formalnya adalah menelaah secara radikal fenomena-fenomena pendidikan dan semua fenomena yang ada hubungannya dengan pendidikan nasional dalam perspektif yang komprehensif dan integratif*, bermuatan konsep dan prinsip dasar dalam upaya pengembangan kemampuan/keahlian dan kepribadian atau karakter yang baik (*"good personality"* atau *"good character"*) dalam kesatuan organis harmonis dan dinamis, dalam mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Daftar Pustaka

- Barnett, Ronald.1992. *Improving Higher Education : Total Quality Care*. Backingham : SRHE and Open University Press.
- Ki Hadjar Dewantara. 1956. Masalah Kebudayaan. Keanang-kenangan promosi doctor honoris causa Ki Hadjar Dewantoro. Yogyakarta : Yayasan Pembinaan Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada.
- 1977. Karya ki Hadjar Dewantara : Bagian Pertama Pendidikan. Yogyakarta : MLPTS
- Dewey, John.1950. Democracy and Education. New York : The Macmillan Company.
- Driyarkara. 2006. Karya Lengkap Driyarkara. A. Sudiarja dkk. (ed). Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ehrlich, Eugene. et.al. 1986. Oxford American Dictionary. New York : Avon Books
- Gadamer, Hans-Georg . 1975. Truth and Method. New York : The seabury Press.
- Goodlad, John I.1994. Educational Renewal. San Francisco : Jossey-Bass Publishers.
- Gruber, Frederick C .1973. Historical and Contemporary Philosophies of Education, New York : Thomas Y. Crowell Company.
- Gutek, Gerald L. 1988. Philosophical and Ideological Perspectives on Education. Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall, Inc.
- Huston, W. Robert (ed).1974. Exploring Competency Based Education. Berkeley : MrTutuhan Publishing Company.
- Hutchins, Robert M .1953. The Conflic in Education. New York : Harper& Brothers.
- Hyman, Ronald T.(ed).1971. Contemporary Thought on Teaching. Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall.
- Imam Barnadib . 1994. Filsafat pendidikan : sistem dan Metode. Yogyakarta : Penerbit Andi Offset.
- Jackson, Philip W. 1971. “The Way Teaching Is” in Hyman, Ronald T (ed) 1971. Contemporary Thought on Teaching. Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall.
- Jacob, T. 2007. Beberapa Prinsip Tentang Pendidikan. Yogyakarta : Kerjasama UGM dan LPMP DIY.
- Kneller, George F. 1971. Introduction to the Philosophy of education . New York : John Wiley & Sons, Inc.
- Lipsitz, Joan . 1995. “Prologue : Why We Should Care About Caring” in
- McCombs, Barbara L. & Whisler, Jo Sue. 1997. The Learner-Centered Classroom and School . San Francisco : Jossey-Bass Publishers.
- Maltz, Maxwell . 1969. Psycho-Cybernetics. New York : Published by Pocket Books

- Mayer, Frederick .1963. Foundations of education. Colombus., Ohio : Charles E. Merril Books, Inc.
- Mochtar Buchori. 1991. Seminar Sehari Bersama Mochtar Buchori . Tanggal 14 Maret 1991. FIP-IKIP YOGYAKARTA.
- 1994. Sepktrum Problematrika Pendidikan di Indonesia. Yogyakarta : PT. Tiara Wacana.
- Noblit, George W, Rogers Dwight L. & McCadden, Brian M .1995. "In the Meantime : The Possibilities of Caring".1995. in McCombs, Barbara L. & Whisler, Jo Sue. 1997. The Learner-Centered Classroom and School . San Francisco : Jossey-Bass Publishers.
- Noeng Muhamad. 2000. Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Edisi V. Yogyakarta : Penerbit Rake Sarasir.
- Notonagoro. 1973. Kuliah Teori Pendidikan Nasional Pancasila. FIP IKIP YOGYAKARTA
- . 1974 . Pidato Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Filsafat pada Prof. Drs. Notonagoro, SH. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Ornstein, Allan C. 1995. "Philosophy as Basis for Curriculum Decisions". In Ornstein, Allan C & Behar Linda S. (ed) Contemporary Issues in Curriculum Boston : Allyn And Bacon
- Sastrapradja, M . 2001. Pendidikan sebagai Humanisasi. Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Soedjatmoko. 1985. Etika Pembebasan. Jakarta : LP3ES
- 1991. Soedjatmoko dan Keprihatinan bangsa. Yogyakarta : PT Tiara Wacana
- Titus, Harold H. 1970. "Philosophy and the Contemporary Scene", in Lucas, Christopher J. (ed) What is Philosophy of education. London : The Macmillan Company